

# KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PEMBAKARAN BATU KAPUR DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Revanza Oktavia Widianingrum

NPP. 30.0842

*Asdaf Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: revanzaoktaviaw@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.H.Muhammad Suhardi, SH., MH

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the many negative environmental and community impacts of limestone burning in Tuban Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the implementation of government collaboration in dealing with the negative impacts of limestone burning, knowing the factors that become obstacles in controlling the limestone mining industry and government efforts to protect the community from environmental damage caused by limestone burning. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that government collaboration in dealing with the impact of limestone burning has been carried out but not optimally because of obstacles in its implementation both from internal factors and external factors of government organizations. Efforts made by the government to protect the community against the impact of limestone burning are data collection and mapping of limestone burning locations, reporting to the provincial government regarding the condition of limestone burning in Tuban Regency, and educating the community. **Conclusion:** Government collaboration in Tuban Regency in protecting the community against the impacts of limestone burning is still not going well because of changes in the transfer of authority from the local government to the central government so that the implementation of control and control cannot be carried out optimally. In order for the control and control activities to be carried out properly, it is recommended to provide a share to the local government to supervise small-scale mining and provide facilities that support the work safety of limestone burning workers to reduce the negative impact of the limestone burning industry.

**Keywords:** Collaboration, Control, Burning, Tuban

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat yang timbul akibat aktivitas pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kolaborasi pemerintah dalam menangani dampak negatif dari pembakaran batu kapur, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penertiban industri pertambangan batu kapur serta upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan

oleh pembakaran batu kapur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah kolaborasi pemerintah dalam menangani dampak pembakaran batu kapur sudah terlaksana namun belum secara maksimal karena adanya kendala dalam pelaksanaannya baik dari faktor internal maupun faktor eksternal organisasi pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat terhadap dampak pembakaran batu kapur adalah pendataan jumlah dan pemetaan lokasi pembakaran batu kapur, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai kondisi pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban, dan melakukan edukasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Kolaborasi Pemerintahan di Kabupaten Tuban dalam melindungi masyarakat terhadap dampak pembakaran batu kapur masih kurang berjalan baik karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga pelaksanaan penertiban serta pengendalian tidak bisa terlaksana secara optimal. Agar kegiatan penertiban serta pengendalian dapat terlaksana secara baik disarankan untuk memberikan andil kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pertambangan skala kecil dan memberikan fasilitas yang mendukung keselamatan kerja para pekerja pembakaran batu kapur untuk mengurangi dampak negatif industri pembakaran batu kapur.

**Kata kunci:** Kolaborasi, Penertiban, Pembakaran, Tuban

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan julukan Negara Kepulauan yang dikenal oleh banyak negara asing memiliki kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam di Indonesia adalah salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia dalam mendorong pembangunan serta menaikkan jumlah devisa yang dimiliki negara, meningkatkan taraf pendapatan asli daerah, menampung lebih banyak tenaga kerja, dan juga meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah sekitar tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertambangan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengeksplorasi, menggali, mengelola, memanfaatkan, dan menjual hasil galian tambang tersebut. Terdapat tiga macam golongan bahan galian dalam pertambangan. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan yang bertujuan sebagai pembatas dalam kegiatan pertambangan sehingga segala jenis dampak yang kemungkinan akan terjadi dapat diatasi.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di bagian utara Provinsi Jawa Timur yang secara geografis merupakan deretan pegunungan kapur. Salah satu potensi batuan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban adalah potensi batu kapur, dan jika dilihat dari banyaknya gunung kapur di Kabupaten Tuban, tentunya hal ini dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian industri pertambangan batu kapur/gamping yang dikelola oleh masyarakat sekitar dimana mayoritas masyarakat Kabupaten Tuban menggunakan batu gamping sebagai bahan utama pembuatan bangunan. Dalam prosesnya, batu gamping ini sendiri harus melewati suatu proses pembakaran dengan tujuan mencegah batu gamping pecah menjadi serbuk kapur yang dapat menurunkan harga jual.

Kegiatan pembakaran batu kapur yang banyak dilakukan oleh industri pertambangan batu kapur tentunya memiliki dampak negatif yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun lingkungan. Pengolahan pada batu kapur ini sendiri menghasilkan debu dan gas-gas polutan yang berakibat buruk bahkan dapat berakibat fatal bagi para pekerja pembakaran batu kapur karena seringkali terkena paparan dari debu dan gas sisa hasil pembakaran yang jumlah konsentrasinya

berbeda-beda. Paparan gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran batu kapur dapat menyebabkan iritasi selaput lendir, kerusakan sistem pernafasan dan kerusakan epitelium, peradangan bronkus, dan penebalan dinding alveoli sehingga menurunkan kapasitas paru dan menyebabkan kematian. Banyaknya jumlah industri pertambangan batu kapur dan aktivitas pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang dialami masyarakat tentunya dibutuhkan pengawasan dari dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang dalam melakukan penanganan, pengawasan, serta pengendalian mengenai lingkungan hidup. Permasalahannya adalah disamping peran Dinas Lingkungan Hidup yang sangat penting dalam pengawasan serta pengendalian dampak aktivitas pembakaran batu kapur, tentunya diperlukan pula peran aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban pertambangan illegal yang masih banyak berdiri dan beraktivitas di Kabupaten Tuban. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, permasalahan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan pencemaran sehingga merugikan masyarakat sekitar lokasi pembakaran harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas industri pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban dan bentuk kolaborasi pemerintahan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dampak yang ditimbulkan industri pembakaran batu kapur oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Salah satu yang menjadi permasalahan utama dalam kolaborasi ini adalah adanya aturan baru yang memindahkan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam urusan pertambangan termasuk industri pembakaran. Pemindahan kewenangan ini mengakibatkan kerumitan dalam pelimpahan urusan perizinan dan pelaksanaan pengawasan serta penertiban. Banyaknya masyarakat yang kurang edukasi mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) memilih untuk tetap mempertahankan industri pengelolaan hasil tambang tanpa peduli tentang dampak negatif yang ditimbulkan.

Faktor lainnya adalah kurangnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar industri pembakaran batu kapur yang mengandalkan pekerjaan sebagai buruh pembakaran batu kapur sebagai profesi tetap. Tingginya sumber daya alam berupa batu kapur menjadi peluang terbesar bagi masyarakat sekitar dalam mata pencaharian dan sumber nafkah. Masyarakat yang tidak dapat lapangan pekerjaan yang lebih baik di luar area pembakaran batu kapur memutuskan untuk tetap menjadikan industri pembakaran batu kapur sebagai sumber penghasilan utama dan menjadi mata pencaharian turun temurun warga sekitar. Hal ini menyebabkan sulitnya penertiban dan pengendalian industri batu kapur baik itu yang legal maupun yang illegal.

Kurangnya kesadaran masyarakat pekerja pembakaran batu kapur akan pentingnya prosedur keamanan dalam pekerjaannya menyebabkan banyaknya korban kecelakaan kerja akibat tidak memperhatikan K3 dalam melaksanakan pekerjaannya. Industri pembakaran batu kapur yang rata-rata masih menggunakan cara manual dalam prosesnya tentu dapat dipastikan belum terjaminnya fasilitas keamanan untuk para pekerjanya. Selain itu bentuk tungku pembakaran yang tidak sesuai standar juga banyak memakan korban jika tidak hati-hati dalam bekerja. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah yang menjadi tujuan dan tugas utama dalam melindungi serta menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi kolaborasi pemerintahan maupun bidang implementasi kebijakan penertiban dan studi tentang dampak yang diakibatkan oleh industri pembakaran. Penelitian oleh Muhammad Fariz Asyikin, Rumzi Samin, dan Fitri Kurniangsih yang berjudul Kolaborasi Satgas Covid-19 dan Satpol-PP Sebagai Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Protokol Kesehatan di Kota Tanjungpinang (Muhammad Fariz dkk, 2023), menemukan bahwa kolaborasi yang dilakukan antara satgas covid-19 dan satpol-pp kota Tanjungpinang berjalan baik dengan dukungan instansi kota dalam menata, membenah, serta memperbaiki keadaan agar bisa mengembalikan keadaan. Penelitian oleh Yusuf Fadli dan Adie Dwiyanto Nurlukman yang berjudul Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang Melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) (Yusuf dkk, 2018), menemukan bahwa kolaborasi pemerintahan dalam pengembangan masyarakat pesisir masih sangat minim bahkan ditingkat internal pemerintah daerah. Penelitian oleh Syarifa Wahidah Al Idrus yang berjudul Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat (Idrus Syarifa Wahidah 2013), menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya melakukan beberapa pendekatan dalam menanggulangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh pengolahan batu kapur seperti pendekatan Teknologi, Pendekatan Institusi, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan pelayanan kesehatan. Penelitian oleh Muhammad Iqbal yang berjudul Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Batu Kapur di Kawasan Kars Citatah Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Muhammad Iqbal, 2017), menemukan bahwa kegiatan pembakaran batu kapur di Kawasan Kars Citatah telah melebihi ambang batas baku mutu udara ambien yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hendaknya melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap industri pertambangan khususnya pertambangan batu kapur yang telah diberikan izin usaha industri di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian oleh I Gede Algunadi, Ida Bagus Made Astawa, dan Sutarjo yang berjudul Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida (I Gede Algunadi dkk, 2016), menemukan bahwa pertambangan batu kapur di Nusa Penida masih kurang intensif dikarenakan kurangnya perlengkapan alat pertambangan yang memadai untuk digunakan dalam pertambangan batu kapur.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada kebijakan pemerintah dalam berkolaborasi dan pengendalian dampak aktivitas pertambangan batu kapur. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Yusuf Fadli dan Adie Dwiyanto Nurlukman tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kolaborasi Pemerintahan dari Ansell dan Gash. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana pelaksanaan kolaborasi pemerintahan dalam melindungi masyarakat terhadap dampak aktivitas pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan upaya Pemerintah Daerah mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat akibat pembakaran batu kapur sebagai bentuk perlindungan masyarakat Kabupaten Tuban.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kolaborasi pemerintahan dalam melindungi masyarakat terhadap aktivitas pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dampak pembakaran batu kapur.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Satpol PP, Pemda, LSM pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, penambang, dan masyarakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori kolaborasi pemerintahan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yang dijelaskan di dalam buku terjemahan oleh Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.Si bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Kondisi Awal**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas ESDM dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi bersama dalam gerakan penertiban aktivitas pertambangan tingkat provinsi. Pada tingkat Kabupaten, Organisasi Perangkat daerah tidak bisa serta merta dalam pelaksanaan penertiban aktivitas pertambangan termasuk juga aktivitas pembakaran batu kapur. Dalam implementasinya dilapangan Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang dalam penertiban industri pertambangan dan pembakaran batu kapur karena tertera pada Undang-Undang Minerba yang terbaru yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang berbunyi semua urusan pertambangan ada di tangan pusat dan didelegasikan kepada pemerintah Provinsi. Saat ini pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki penegakan hukum apapun baik administrasi maupun pidana untuk menunjang standar operasional yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penertiban. Pelaksanaan penertiban dapat dilakukan jika ada perintah langsung dari Kepala Daerah karena Organisasi Pemerintah Daerah terkait tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penertiban.

### **3.2. Desain Kelembagaan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban secara khusus telah mengatur tentang kawasan layak tambang dan kawasan yang harus di lindungi yaitu Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Induk Kawasan Pertambangan Kabupaten Tuban. Disana menjelaskan tentang dimana saja wilayah mana saja yang diperuntukkan menjadi pertambangan kapur serta lokasi proses industri dan kawasan mana saja yang seharusnya dilindungi. Pengawasan dan penertiban pertambangan serta

pembakaran batu kapur pada dasarnya memang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang artinya hal ini memang sudah harus diketahui dan dipahami serta dilaksanakan oleh setiap pemilik industri pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban. Dalam peraturannya juga telah dijelaskan sanksi-sanksi yang akan diterima oleh industri pembakaran batu kapur yang nakal seperti yang tidak memiliki izin usaha atau yang melanggar AMDAL yang berlaku.

### **3.3. Kepemimpinan Fasilitatif**

Dalam upaya melindungi masyarakat Kabupaten Tuban dari paparan dampak aktivitas pembakaran batu kapur tentunya dapat terlaksana dengan baik jika fasilitas dalam pengawasan serta penindakan terpenuhi. Pengawasan serta penindakan kegiatan pembakaran batu kapur tentunya dilaksanakan dengan cara humanis kepada pemilik usaha pembakaran dan juga kepada pekerja pembakaran batu kapur tersebut. Penindakan tidak dapat serta merta dilakukan tanpa adanya teguran terlebih dahulu oleh pihak berwenang kepada pemilik usaha pertambangan.

### **3.4. Proses Kolaborasi**

Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan kolaborasi pemerintahan terkait penanganan dampak aktivitas pembakaran batu kapur yang merugikan masyarakat dalam prosesnya tentu memperhatikan berbagai faktor guna tercapainya tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dari dampak aktivitas pembakaran batu kapur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses kolaborasi adalah Usaha dalam membangun kepercayaan peserta kolaborasi satu dengan yang lain, Usaha dalam membangun komitmen selama proses kolaborasi berjalan, Paham tentang misi dan mendalami permasalahan yang akan diselesaikan. Serta kemampuan dalam mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi, mampu melihat dengan sudut pandang luas bagaimana melakukan perencanaan strategis dan penemuan fakta-fakta secara bersama sehingga meraih kesuksesan awal, terjadi negosiasi dengan tujuan mencapai itikad yang baik

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Kolaborasi Pemerintahan dalam penertiban pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dan belum sesuai harapan walaupun Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan kolaborasi antara beberapa OPD di Kabupaten Tuban dalam penanganan dampak pembakaran batu kapur dengan melakukan pengawasan rutin terhadap industri-industri pembakaran batu kapur yang ada di Kabupaten Tuban tanpa melebihi kewenangan yang dimiliki. Penulis menemukan penemuan bahwa walaupun kewenangan dalam hal penertiban telah dialihkan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Kabupaten Tuban masih berupaya melakukan pengawasan terhadap industri pembakaran batu kapur terutama yang belum sesuai standar dan belum memiliki izin. Hal ini dikarenakan dari pihak Pemerintah Kabupaten merasa prihatin dengan kondisi lingkungan serta dampak yang ditimbulkan industri pembakaran terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya juga masyarakat pekerja yang tidak memperhatikan K3 dalam pekerjaannya sehingga dapat mengancam keselamatan.

Peran Pemerintah Daerah masih sangat penting dalam penanganan industri pembakaran batu kapur dalam skala kecil di masyarakat guna mengontrol dan mengawasi kondisi lingkungan di area perindustrian. Walau bagaimanapun pemerintah daerah lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah daripada pemerintah pusat yang nantinya tidak terfokus kepada satu daerah saja.

Untuk saat ini perlindungan yang dilakukan Pemda Kabupaten Tuban masih dalam bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari aktivitas pembakaran batu kapur. kegiatan pembakaran batu kapur harus sesuai prosedur dan standar yang telah ditentukan baik itu dari lokasi industri, sarana prasarana, dan juga fasilitas lain yang mendukung keselamatan para pekerja. Fakta yang ditemukan bahwa masyarakat bekerja masih acuh tak acuh tentang dampak lingkungan bahkan dampak untuk

kesehatan serta keselamatan diri mereka sendiri. Dalam pemikiran masyarakat bahwa mereka hanya mencari nafkah untuk menyambung hidup entah bagaimana dampak negatif yang diterima oleh diri mereka masing-masing.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa banyak industri pembakaran yang ternyata masih dimiliki oleh pejabat pemerintahan sehingga kebocoran informasi terkait penertiban yang akan dilaksanakan tidak dapat terelak lagi. Sering kali terjadi para pekerja pembakaran ditemukan sudah meninggalkan lokasi pembakaran batu kapur saat petugas datang untuk melaksanakan pengawasan serta penertiban.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Desa Jadi ini yaitu penambang merupakan pekerjaan turun temurun, masyarakat sadar akan lingkungan tetapi mereka tidak ada pilihan lain dalam pekerjaan selain menambang batu kapur karena tuntutan ekonomi yang semakin besar.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Tuban mengenai Kolaborasi Pemerintahan Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Aktivitas Pembakaran Batu Kapur Di Kabupaten Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melindungi masyarakat dari dampak aktivitas pembakaran batu kapur adalah dengan melaksanakan pengawasan, penertiban, serta penindakan kepada industri pembakaran batu kapur yang masih belum sesuai prosedur namun dalam pelaksanaannya kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tuban belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya peraturan baru yang memindahkan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal pengawasan serta penindakan segala kegiatan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tuban yang lebih mengerti kondisi di lapangan menjadi tidak bisa berkutik karena tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat buruh pembakaran batu kapur dan data lokasi dan jumlah industri pembakaran batu kapur yang ada ilegal maupun yang telah berizin. Penelitian juga mengambil sampel pada satu desa saja yang terkenal dengan banyaknya tungku pembakaran batu kapur yaitu Desa Trutup. Ini dilakukan karena keterbatasan jarak tempat untuk penulis dalam mengambil data diseluruh wilayah industri pembakaran di Kabupaten Tuban.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Tuban, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- UU. (2020). *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*.
- Peraturan Bupati. (2016). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Induk Kawasan Pertambangan Kabupaten Tuban*.
- Iqbal, M. (2016). *Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Batu Kapur di Kawasan Kars Citatah Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara* [Skripsi, Universitas Islam Bandung]. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/12148>
- Asyikin, Muhammad Fariz And Samin, Rumzi And Kurnianingsih, Fitri (2023). *Kolaborasi Satgas Covid-19 Dan Satpol Pp Sebagai Upaya Pencegahan, Pengendalian Dan Penegakan Protokol Kesehatan Di Kota Tanjungpinang*. S1 Thesis, Universitas Maritim. <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/5056>
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). *Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)*. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 1). <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/94/95>
- Algunadi, I. G., Astawa, I. B. M., & Sutarjo, S. (2016). Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jjpg.v4i1.20525>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practic. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Idrus, S. W. Al. (2013). Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat. *Jurnal Pijar Mipa*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/jpm.v8i2.83>